

ANALISIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

ROSWITA HAFNI¹

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : roswita_ayu@yahoo.com

AHMAD ROZALI²

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan identik dengan terciptanya laju pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, salah satu sektor riil yang dapat mengurangi tingkat pengangguran adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana alat yang digunakan sebagai motor penggerak adalah orang-orang yang bekerja di perkotaan maupun pedesaan dalam ruang lingkup usaha kecil maupun menengah. UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terbukti pada waktu bangsa Indonesia mengalami krisis yang terjadi beberapa waktu lalu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi realita tersebut, sedangkan usaha yang berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan demikian apa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data secara objektif terhadap kondisi yang ada, perkembangan usaha mikro kecil menengah dan perkembangan dalam penyerapan tenaga kerja semuanya terangkum dalam fokus penelitian, yaitu perkembangan sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia serta karakteristik ketenagakerjaan dan peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sangatlah besar, karena dapat dilihat dari perkembangan UMKM yang terus menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penelitian ini, dapat disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci : UMKM, penyerapan tenaga kerja

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya pembangunan ekonomi yang dilakukan negara berkembang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya akan mampu dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi angka pengangguran.

Masalah utama yang dihadapi kebanyakan Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk Indonesia hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih (*unskilled*) bagi pembangunannya, sehingga penduduk yang besar bukan merupakan beban pembangunan, justru menjadi modal pembangunan.

Produktivitas pekerja sangat rendah. Yang dimaksud dengan produktivitas adalah tingkat produksi yang dapat dihasilkan seorang pekerja per tahun. Dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di negara maju, tingkat produktivitas seorang di negara berkembang masih relatif sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

Sebagian besar penduduk di negara berkembang berada di sektor pertanian tradisional yang sering menghadapi berbagai masalah pengangguran terselubung. Produktivitas pertanian tradisional biasanya sangat rendah, oleh karena teknologi dalam kegiatan pertanian masih sangat tradisional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan Amerika Serikat. Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain potensi yang dimiliki Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM) selain itu terdapat keunggulan-keunggulan UMKM dibandingkan dengan usaha besar, yaitu: 1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. 2. Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian. 3. Kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan tenaga kerja. 4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar yang pada umumnya birokratis. 5. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. 6. Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia. 7. Tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Azrin, 2004).

Dengan adanya beberapa nilai positif tersebut, pemerintah mulai untuk mengembangkan industri kecil dengan melakukan beberapa kebijakan untuk memperkuat posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didalam perdagangan dalam negeri dan internasional agar tidak kalah bersaing dengan negara lain salah satunya adalah China.

Tabel 1
Banyak Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil Menurut Provinsi dalam 10 Tahun Terakhir 1996-2006

No	Provinsi	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Nangroe Aceh Darussalam	61.983	143.446
2	Sumatera Utara	76.857	180.778
3	Sumatera Barat	57.347	115.715
4	Riau	21.768	59.047
5	Jambi	17.248	42.820
6	Sumatera Selatan	52.169	126.445
7	Bengkulu	12.056	26.769
8	Lampung	87.994	199.966

9	Bangka Belitung	6.012	14.977
10	Kepulauan Riau	7.578	16.852
11	Dki Jakarta	34.187	167.656
12	Jawa Barat	451.396	1.131.791
13	Jawa Tengah	830.726	1.892.979
14	Di Yogyakarta	75.950	158.280
15	Jawa Timur	664.938	1.392.447
16	Banten	77.457	173.500
17	Bali	83.052	174.899
18	Nusa Tenggara Barat	124.103	263.728
19	Nusa Tenggara Timur	70.026	121.212
20	Kalimantan Barat	39.740	88.660
21	Kalimantan Tengah	18.188	41.653
22	Kalimantan Selatan	48.164	94.072
23	Kalimantan Timur	14.127	37.769
24	Sulawesi Utara	30.823	65.333
25	Sulawesi Tengah	23.880	49.045
26	Sulawesi Selatan	108.067	220.981
27	Sulawesi Tenggara	39.429	77.437
28	Gorontalo	14.958	28.274
29	Sulawesi Barat	13.562	23.774
30	Maluku	14.802	29.105
31	Maluku Utara	7.575	15.469
32	Irian Jaya Barat	2.498	6.956
33	Papua	5.946	13.521

Dilihat dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peranan UMKM begitu terasa terhadap penyerapan tenaga. Dimana Jawa Tengah sangat dominan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Dimana diperlukan perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk-produk lain dari luar negeri.

Pentingnya UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis, yakni jumlah orang yang bekerja dikelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang diserap oleh usaha besar, tetapi juga dapat dilihat pada kondisi dinamis, yakni dari laju kenaikannya setiap tahun yang lebih tinggi daripada usaha besar.

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan UMKM harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka menjadi pengusaha menengah. Namun, disadari pula bahwa pengembangan UMKM menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajer sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah:

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia
4. Keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5. Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi UMKM dapat dibagi dalam dua kategori berikut:

1. Bagi usaha dengan omzet kurang dari Rp 300 juta per tahun umumnya tantangan yang mereka hadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup.
2. Bagi usaha dengan omzet antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar setahun, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh usaha jenis ini adalah:
 - a. Masalah belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
 - b. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank ,aupun medal ventura karena kebanyakan UMKM mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.
 - c. Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar sangat ketat.
 - d. Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen berbeda.
 - e. Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku.

- f. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyaknya barang pengganti.
- g. Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa banyak jumlah unit usaha dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia?
2. Seberapa luas penyebaran UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia?
3. Bagaimana jumlah unit, dan penyebaran mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia?

B. KAJIAN TEORITIS

1. Ketenagakerjaan Indonesia

Indonesia adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis. Dari aspek legal, sejak 2004 negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum dibidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diundangkan. Ini merupakan satu dari tiga peraturan yang memayungi persoalan ketenagakerjaan dinegeri ini. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu saja, Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan negara ke-lima didunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi. Ini terdiri dari 8 konvensi pokok, 8 konvensi umum, dan 2 konvensi lainnya. Kendati demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki persoalan ketenagakerjaan.

Indonesia merupakan sedikit dari negara yang mampu bertahan menghadapi resesi global, yang terjadi akhir 1990-an. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang perekonomiannya jauh lebih maju, dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif. Kendati dampak negatif krisis dirasakan diseluruh wilayah, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif berkat pasar domestik yang besar.

Sayangnya, penciptaan lapangan kerja tidak selalu dihasilkan secara otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami apa yang terjadi di banyak negara didunia, yakni apa yang disebut dengan pertumbuhan angka pengangguran. Dalam banyak hal, pasar tenaga kerja Indonesia tidak pernah sepenuhnya pulih dari krisis keuangan Asia. Persentase pekerjaan informal dan setengah pengangguran (*underemployment*) kurang lebih tetap sama sejak 1996, yakni sebelum krisis terjadi. Peluang kerja untuk kaum muda pun nyaris tidak berkembang selama dasawarsa terakhir.

2. Beberapa Teori Ketenagakerjaan

a. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Smith menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya

kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*Necessary Condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Ia menghemat waktu. Ia mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam memproduksi. Akhirnya, produksi meningkatkan berbagai hal. Akan tetapi, pembagian kerja tergantung pada luas pasar.

b. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah *Principles of Population*. Dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah satu pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia.

Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berlomba dengan penduduk. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi per kepala. Dalam *Essays on the Principles of Population* (1796). Ia menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari dari malapetaka pertumbuhan penduduk adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang Malthus tawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Pembatasan seperti ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. Jika hal ini tidak dilakukan, demikian ia menguraikan, persoalan ini akan diselesaikan secara alamiah, antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

c. Teori Keynes

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa dan balas jasa dari faktor-faktor produksi lainnya.

Kaum klasik juga percaya bahwa dalam keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*fully-employed*). Dengan demikian dibawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang sangat rendah. Ketersediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak.

Jadi, dalam pasar persaingan sempurna mereka yang mau bekerja pasti akan memperoleh pekerjaan. Pengecualian, berlaku bagi mereka yang “pilih-pilih” pekerjaan, atau tidak mau bekerja dengan tingkat upah yang diatur oleh pasar. Tetapi kalau ada yang tidak bekerja karena dua alasan yang disebutkan diatas, mereka ini oleh kaum klasik tidak digolongkan pada pengangguran, melainkan pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*).

Kritikan John Maynard Keynes (1883-1946) yang lain terhadap sistem klasik yang juga sangat perlu diperhatikan ialah pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (*adjustment*) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan (*equilibrium*) pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kaum klasik percaya bahwa dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk di dalamnya sumber tenaga kerja, akan dimanfaatkan secara penuh (*fully employed*). Kalau seandainya terjadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan/kebijaksanaan apa pun. Pandangan klasik ini tidak diterima oleh Keynes. Menurut pandangan Keynes, dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik diatas. Di manapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Dari sini Keynes mengecam analisis kaum klasik yang didasarkan pada pengandaian-pengandaian yang keliru dengan kenyataan hidup sehari-hari.

d. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar ini tidak diikuti dengan permintaan yang besar pula, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

Peran modal fisik didalam model pertumbuhan amat besar. Tetapi, kapasitas hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Disamping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan perkapita asalkan modal fisiknya meningkat. Penduduk (dalam hal ini angkatan kerja) diasumsikan meningkat secara geometris dan *full employment* selalu tercapai. Pendapat tersebut berbeda dengan Malthus, dimana Malthus mengungkapkan bahwa jumlah penduduk yang besar cenderung mengurangi hasil pembangunan ekonomi, karena dalam model ini *out put* nya dinyatakan dalam per kapita atau per pekerja.

3. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Sony Sumarsono, 2003).

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja: 1. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah jumlah tenaga kerjanya. Keadaan ini mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser kekanan. 2. Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini produsen cenderung akan meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah besar. Disamping itu permintaan akan tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi. Keadaan ini akan mengakibatkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja kearah kanan karena pengaruh skala efek atau substitusi efek.

Efek selanjutnya akan terjadi apabila harga-harga barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang-barang modal (mesin) sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi secara relatif penggunaan tenaga kerja berkurang. Hal ini akan mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser kekiri.

Apabila seorang pengusaha meminta suatu faktor produksi maka hal itu dilakukan bukan untuk memperoleh kepuasan langsung yang diharapkannya dari faktor produksi tersebut. Ia menginginkan faktor-faktor produksi karena harapan akan hasil daripadanya, misalkan permintaan pengusaha akan tenaga kerja (Winardi, 1995).

4. Pembangunan UMKM

Usaha kecil dan menengah di mana pun memegang peranan penting. Bahkan usaha besar, agar lincah, harus berperilaku seperti usaha kecil yang saling berkaitan. Dalam mendiskusikan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, filsafat seperti ini menganjurkan orientasi strategi pembangunan “regional” yang mayoritas melibatkan produksi lokal dan usaha kecil untuk penggunaan dan konsumsi lokal. Teori pembangunan yang ia tawarkan menekankan pentingnya “*intermediate technology*”. Dengan kata lain, intinya usaha kecil dan menengah (bukan konglomerat), serta teknologi madya (bukan teknologi tinggi) yang lebih penting dikembangkan bagi pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Bagaimana dengan Indonesia? Perhatian terhadap usaha kecil mulai muncul saat Presiden Soeharto merencanakan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional pada 15 Mei 1996. Presiden Soeharto mengatakan bahwa kemitraan usaha jangan sampai menimbulkan beban yang memberatkan rakyat sebab tujuan kemitraan membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan usaha. Pada masa tersebut Kelompok Jimbaran mengumumkan bahwa sebanyak 41 kelompok usaha besar telah menyatakan komitmennya akan bermitra dengan 99.662 koperasi dan pengusaha kecil di seluruh Indonesia dengan nilai kemitraan lebih dari Rp.2,9 triliun.

Ada dua definisi UMKM yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha menurut Undang –undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut UU ini, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria antara lain: kekayaan bersih Rp.50 juta sampai Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp.300 juta sampai Rp.2,5 miliar.

Sedangkan bagi usaha mikro, dimana usaha tersebut sebuah usaha produktif mili orang perorangan atau badan usaha perorangan, serta memenuhi kriteria antara lain: kekayan bersih paling banyak Rp.50 juta, atau memilki total omzet paling banyak Rp.300 juta per tahun.

Dan terakhir usaha menengah yaitu, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Serta memenuhi kriteria antara lain: kekayaan bersih Rp.500 juta sampai dengan Rp.10 miliar, atau memiliki hasil usaha penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 miliar sampai Rp.50 miliar.(Kuncoro, 2010 hal: 185)

Tabel 2

No	Segmen Klasifikasi Industri	Tenaga Kerja
1	Industri Rumah Tangga	1-4
2	Industri Kecil	5-9
3	Industri Sedan/Menengah	10-99
4	Industri Besar	Lebih dari 100 orang

Sumber: BPS (2005)

5. Profil dan Sebaran UMKM

Kendati ada beberapa definisi mengenai UMKM, namun agaknya UMKM mempunyai karakteristik yang hampir seragam. *Pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang adminidtrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekat. Data BPS (1994) menunjukkan hingga saat itu jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15,635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum. Menurut catatan BPS (1994), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak 124.990, ternyata 90,6 % merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 % tergolong perusahaan berakta notaris; dan hanya 1,7 % yang mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma atau Koperasi).

Keempat, dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan dan minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih kecil.

Industri kecil rumah tangga (IKRT) memliki peranan yang cukup besar dalam industri manufaktur dilihat dari sisi jumlah usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai tambah. IKRT, dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, mampu menyediakan kesempatan kerja lebih baik. Data dari Sensus Ekonomi 1996 dan 2006 menunjukkan tren yang relatif tidak berubah. Sekitar 99 % jenis usaha di Indonesia tergolong sebagai IKRT. Selain dominan dalam jumlah unit usaha, ternyata tenaga kerja yang diserap oleh IKRT masih sekitar sekitar 59 % dari total tenaga kerja yang terserap untuk sektor industri.

Tabel 3
Pangsa IKRT di Jawa dan Indonesia

Wilayah	Tenaga Kerja		Jumlah Unit Usaha	
	1996	2006	1996	2006
Greater Jakarta	16,6	10,9	5,3	18,7
Greater Surabaya	8,2	8,3	7,5	3,5
Greater Bandung	7,1	5,3	4,3	5,8
Metropolitan (1-3)	31,9	24,5	17,0	28,0
Wilayah Lain	68,1	75,6	83,0	72,0
Total Jawa	100,0	100,0	100,0	100,0
% Jawa terhadap indonesia	75,6	60,3	65,6	58,7
<i>Memo item</i>	<i>(dalam ribuan)</i>		<i>(dalam ribuan)</i>	
Total Jawa	168	299	161	111

Sumber: Diolah dari Sensus Ekonomi 1996 dan 2006

Dilihat dari sebaran geografisnya, IKRT terkonsentrasi di pulau Jawa. Meskipun terjadi penurunan dari tahun 1996 ke 2006, kontribusi IKRT di Jawa masih dominan. Kontribusi IKRT menurut penyerapan tenaga kerja menurun dari 75,6 % pada tahun 1996 menjadi 60,3 % pada tahun 2006. Sementara itu, kontribusi IKRT di Jawa menurut jumlah unit usaha (perusahaan) juga mengalami penurunan, dari 65,6 % menjadi 58,7%. Adanya penurunan kontribusi IKRT di Jawa terhadap Indonesia menunjukkan adanya perkembangan IKRT di luar Jawa yang cukup menggembarakan. Pergeseran kontribusi ini memperlihatkan IKRT di luar Jawa semakin diberdayakan dan mengalami perkembangan yang meningkat. Di luar wilayah metropolitan Jawa, banyak IKRT terkonsentrasi secara spasial di kota-kota kecil, terutama di wilayah pesisir pantai. (Kuncoro; 2010).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup Indonesia. Sumber data adalah data skunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, metode deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. (Hasan, 2009)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Sejarah ekonomi Indonesia adalah sejarah hilangnya kesempatan. Ini berdasarkan serangkaian tulisan dari Anne Booth. Anne Booth adalah guru besar dari School of Oriental and Asian Studies (SOAS) di London yang memiliki sejumlah publikasi yang panjang tentang sejarah Indonesia. Dis dikenal dari karya nya yang berjudul *Agricultural Development in Indonesia* (1988) dan dua buku lainnya, yakni *Indonesia Economic History in the Dutch Colonial Era* (1990), yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai survei pertama sejarah ekonomi modern Indonesia, dan *The Oil Boom and After; Indonesian Economic Policy and Performance in the Suharto Era* (1992).

Kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong lambat, akibat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Awal tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian Indonesia kedepan. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian ditahun lalu mengalami perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonom justru memprediksi bahwa ditahun 2015 perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan.

Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bahkan ditengah kondisi ekonomi internasional yang terbilang pesimis dalam beberapa tahun terakhir? Berikut ini sejumlah data yang dikumpulkan dari data-data Bank Indonesia dan sejumlah kalangan mengenai perkembangan ekonomi di tahun 2015. Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga *Deposit Facility* masing-masing tetap pada posisi level 8,00% dan 5,75%. Kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju sasaran 4,1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ketingkat yang lebih sehat.

Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian pada tahun lalu, ditahun ini Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan Amerika Serikat. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran.

Sementara itu, kegiatan investasi juga masih tumbuh terbatas. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih solid. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan tahun 2014, disamping tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

2. Gambaran Umum Variabel Penelitian

a. UMKM di Indonesia

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang menengarai deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomerat lah yang mendapat keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut ataupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro & Abimanyu, 1995).

Tabel 4
Banyaknya Perusahaan/Usaha Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha dan Skala Usaha (unit)

Klasifikasi Lapangan Usaha	Usaha Besar	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Tidak dapat diklarifikasi	Jumlah
Pertambangan dan Penggalian	352	527	22.884	222.954	195	246.912
Industri Pengolahan	8.668	26.229	287.936	2.855.272	0	3.178.105
Listrik, Gas dan Air	750	2.198	1.287	9.244	837	14.316
Konstruksi	1.818	5.385	38.286	114.586	314	160.389
Perdagangan Besar dan Eceran	17.320	52.225	1.427.967	3.644.569	3.008	5.145.089
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.096	18.353	232.254	1.003.637	166	1.255.506
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2.293	12.302	90.264	322.180	2.799	429.838
Perantara Keuangan	7.314	13.606	24.812	30.953	1.618	78.303
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.734	15.552	75.264	709.753	716	803.019
Jasa Pendidikan	787	4.204	52.160	283.622	596	341.369

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	708	4.147	29.648	132.065	1.296	167.864
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Lainnya	610	5.455	116.461	987.314	553	1.110.393
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	9	22	945	20.365	9	21.350
Jumlah	43.459	160.205	2.400.158	10.336.514	12.107	12.952.453

Sumber: BPS

Dari data dapat kita lihat, usaha mikro mendominasi banyaknya usaha dari segala jenis klasifikasi lapangan usaha dengan jumlah 10.336.514 unit atau dengan rata-rata 79,80%. Dari jenis usaha pertambangan dan penggalian sebanyak 222.954 unit dengan rata-rata 90,30%. Jenis pengolahan sebanyak 2.855.272 unit atau sebesar 89,84%. Listrik, gas dan air sebanyak 9.244 unit atau sebesar 64,57%. Perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.644.569 unit atau sebesar 70,83%. Konstruksi sebanyak 114.586 unit atau sebanyak 71,44%. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 1.003.637 unit atau sebesar 79,93%. Transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 322.180 unit atau sebesar 74,95%. Keuangan sebanyak 30.953 unit atau sebesar 39,52%. Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebanyak 709.753 unit atau sebesar 88,38%. Jasa pendidikan sebanyak 283.622 unit atau sebesar 83,08%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 132.065 unit atau sebesar 78,67%. Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya dan perorangan lainnya sebanyak 987.314 unit atau sebesar 88,91%. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga sebanyak 20.365 unit atau sebesar 95,38% dari seluruh klasifikasi usaha di skala usaha mikro.

Tabel 5
Banyaknya Tenaga Kerja Perusahaan/Usaha Menurut Provinsi dan Skala Usaha (jiwa)

Provinsi	Tempat Permanen					Jumlah
	Usaha Besar	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Tidak Dapat Diklarifikasi	
NAD	15.221	18.042	139.620	413.245	2.398	588.526
Sumatera Utara	211.581	124.535	520.100	839.865	18.200	1.714.281
Sumatera Barat	41.779	35.473	174.229	459.376	2.866	713.725
Riau	66.705	33.039	174.606	384.729	6.368	565.447
Jambi	36.205	41.834	83.659	240.106	2.553	404.357
Sumatera Selatan	59.918	55.563	185.037	522.073	412	823.003

Bengkulu	5.706	8.563	43.971	136.367	599	195.206
Lampung	83.309	39.811	177.405	665.126	1.094	956.745
Bangka Belitung	14.796	12.880	74.764	77.853	3.173	183.466
Kepulauan Riau	131.533	50.989	61.854	90.945	261	635.582
DKI Jakarta	822.245	382.811	852.827	658.839	34.172	2.150.894
Jawa Barat	1.111.251	689.331	1.839.995	3.559.196	24.240	7.124.013
Jawa Tengah	610.745	418.784	1.237.796	3.784.118	19.214	6.070.652
DI Yogyakarta	74.788	68.233	178.756	418.956	1.405	42.138
Jawa Timur	705.088	496.297	1.412.813	4.097.229	34.222	6.145.649
Banten	276.571	108.965	302.773	661.728	2.518	1.052.555
Bali	99.338	108.289	225.671	420.204	4.411	857.913
Nusa Tenggara Timur	17.977	45.669	127.214	551.065	3.133	745.058
Nusa Tenggara Barat	9.687	17.813	55.659	372.021	1.003	556.183
Kalimantan Barat	53.311	28.030	139.673	325.665	1.950	548.629
Kalimantan Tengah	20.711	16.253	87.456	211.222	1.545	337.187
Kalimantan Selatan	50.000	30.020	115.340	336.808	6.240	538.408
Kalimantan Timur	82.459	52.340	147.716	251.497	17.386	551.398
Sulawesi Utara	17.581	16.235	73.199	260.404	2.005	369.424
Sulawesi Tengah	7.444	15.262	59.530	209.780	1.199	293.215
Sulawesi Selatan	68.961	67.091	253.915	762.189	4.178	1.156.334
Sulawesi Tenggara	12.532	13.146	47.931	237.390	261	311.260
Gorontalo	4.425	4.867	16.202	94.776	265	120.535
Sulawesi Barat	1.466	3.624	19.708	88.291	517	113.606
Maluku	9.304	9.306	23.706	113.662	503	156.481
Maluku Utara	7.363	6.369	19.366	61.739	1.814	96.651

Papua Barat	7.323	4.530	19.277	43.680	450	75.260
Papua	22.765	14.324	50.803	97.622	1.571	87.085
Indonesia	4.760.083	3.038.313	8.842.571	21.447.768	202.126	38.390.886

Dari wilayah Sumatera, di usaha menengah Sumatera Utara memiliki 124.535 tenaga kerja yang mana itu adalah jumlah terbanyak dengan rata-rata 41,96% dari jumlah tenaga kerja usaha menengah diseluruh provinsi yang ada dipulau Sumatera. Dari usaha kecil Sumatera Utara juga unggul dengan jumlah tenaga kerja 520.100 orang atau 31,80% dari rata-rata keseluruhan tenaga kerja di pulau Sumatera. Untuk usaha mikro, Sumatera Utara juga masih mendominasi tenaga kerja dengan jumlah 839.865 orang atau 21,93% dari rata-rata keseluruhan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Untuk wilayah Jawa, di usaha menengah Jawa Barat unggul dengan provinsi-provinsi lain, yaitu dengan jumlah tenaga kerja 689.331 atau 31,84% dari rata-rata keseluruhan tenaga kerja yang ada di pulau Jawa. Dari usaha kecil, Jawa Barat juga memegang jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sebesar 1.839.995 orang atau 31,58% dari rata-rata jumlah tenaga kerja di pulau Jawa. Untuk usaha kiro, Jawa Timur yang mempunyai jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sebesar 4.097.229 orang atau 31,08% dari rata-rata jumlah tenaga kerja di pulau Jawa.

Di wilayah Nusa Tenggara dan Bali, di usaha menengah Bali mempunyai tenaga kerja yang lebih banyak yaitu sebesar 108.289 orang atau 63,04% dari rata-rata jumlah tenaga kerja di wilayah tersebut. Untuk usaha kecil Bali juga unggul dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 224.671 orang atau 55,23% dari rata-rata jumlah tenaga kerja. Sedangkan di usaha mikro Nusa Tenggara Timur unggul dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 551.065 orang atau 41,02% dari rata-rata jumlah tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut.

Di wilayah Kalimantan, usaha menengah didominasi tenaga kerja dari provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52.340 orang dengan rata-rata 41,32% dari keseluruhan tenaga kerja yang ada di wilayah Kalimantan. Usaha kecil juga provinsi Kalimantan Timur mendominasi tenaga kerja sebanyak 147.716 orang dengan rata-rata 30,13% dari keseluruhan tenaga kerja yang ada diwilayah tersebut. Sedangkan di usaha mikro tenaga kerja didominasi oleh Kalimantan Selatan sebanyak 336.808 orang dengan rata-rata 29,23%.

Di wilayah Sulawesi, usaha menengah didominasi tenaga kerja dari provinsi Sulawesi Selatan 67.091 orang dengan rata-rata 55,80% dari keseluruhan tenaga kerja di wilayah tersebut. Usaha kecil juga Sulawesi Selatan mendominasi tenaga kerja sebanyak 253.915 orang dengan rata-rata 53,96% dari jumlah tenaga kerja di wilayah tersebut. Sulawesi Selatan juga mempunyai tenaga kerja yang paling banyak di usaha mikro yaitu sebesar 762.189 orang atau dengan rata-rata 45,30%.

Di wilayah Maluku dan Papua, usaha menengah di dominasi tenaga kerja dari provinsi Papua sebesar 13.324 orang dengan rata-rata 41,48%. Dan usaha kecil juga masih dipegang provinsi Papua sebesar 50.803 orang dengan rata-rata 44,90%. Sedangkan di usaha mikro provinsi Maluku mempunyai jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sebesar 113.662 orang atau dengan rata-rata 35,88%.

b. Tenaga Kerja di Indonesia

Jumlah tenaga kerja dapat menggambarkan ketersediaan pasokan bagi pasar tenaga kerja dan berpotensi untuk memproduksi barang dan jasa. Selama periode 2011-2014, jumlah

angkatan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebanyak 116,09 juta orang, dan jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 sebanyak 121,87 juta orang. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan jumlah angkatan kerja rata-rata sebesar 1,63% setiap tahunnya. Menurut Bloom dan Freeman (1986), peningkatan ketersediaan angkatan kerja ini merupakan salah satu akibat dari pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia selama 2011-2014 adalah sebesar 1,3% setiap tahunnya.

Tabel 6
Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011-2015

Tahun	Jenis Kelamin	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
2011	L	67.888.233	4.838.932	72.727.165	13.950.358
	P	39.528.076	3.842.460	43.370.536	43.803.658
	L+P	107.416.309	8.681.392	116.097.701	57.754.016
2012	L	70.001.131	4.279.203	74.280.334	13.925.072
	P	42.503.737	3.065.663	45.569.400	43.099.026
	L+P	112.504.868	7.344.866	119.849.734	57.024.098
2013	L	70.335.241	4.508.503	74.843.744	14.931.437
	P	42.425.831	2.902.428	45.328.259	44.863.921
	L+P	112.761.072	7.410.931	120.172.003	59.795.358
2014	L	71.463.307	4.362.787	75.826.094	15.475.420
	P	43.164.719	2.882.118	46.046.837	45.643.853
	L+P	114.628.026	7.244.905	121.872.931	61.119.273
2015	L	73.424.763	4.487.241	77.912.004	14.202.350
	P	47.422.058	2.967.526	50.389.584	42.095.677
	L+P	120.846.821	7.454.767	128.301.588	56.298.027

Diolah dari Sakernas Februari dan Agustus

Angkatan kerja juga dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin. Angkatan kerja yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah angkatan kerja di Indonesia (2011-2014). Pada tahun 2014, dari total keseluruhan angkatan kerja, sebanyak 62,22% adalah angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki, atau dengan perbandingan antara angkatan kerja laki-laki dan angkatan kerja perempuan adalah sebesar 6:4. Perbedaan jumlah angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin

berkaitan dengan rasio jenis kelamin yang mencapai 101,13, yang berarti setiap 100 wanita terdapat 101 sampai 102 laki-laki. Selain itu, lebih rendahnya penawaran angkatan kerja perempuan disebabkan oleh peran gender, dimana perempuan bertanggung jawab untuk mengurus anak dan rumah rumah (ibu rumah tangga).

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 128,30 juta orang, dimana 94,19% diantaranya atau sekitar 120,85 juta orang memiliki pekerjaan. Pada tahun 2015 ini, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (84,58%) lebih tinggi daripada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (54,48%). Kemudian untuk jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja ada sebanyak 56,3 juta orang, dimana 75,77% diantaranya adalah perempuan.

Kemudian jumlah angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin juga terus mengalami peningkatan selama tahun 2011-2014. Jumlah angkatan kerja laki-laki meningkat rata-rata sebesar 1,4% setiap tahun. Sementara itu, pertumbuhan jumlah angkatan kerja perempuan lebih tinggi, yaitu rata-rata sebesar 2,02% setiap tahun.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang aktif bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau sering disebut pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2011 sebanyak 107,41 juta orang, pada tahun 2012 meningkat menjadi 112,50 juta orang, kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 112,76 juta orang, dan pada tahun 2014 sebanyak 114,62 juta orang. Peningkatan yang terjadi selama tahun 2011-2014 tersebut rata-rata sebesar 2,19% setiap tahun.

Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, sebagian besar pekerja di Indonesia adalah pekerja laki-laki. Selama tahun 2011-2014, sekitar 60% pekerja berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, selama tahun tersebut, jumlah laki-laki yang bekerja juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 67,98 juta orang pada tahun 2011 menjadi 71,46 juta orang pada tahun 2014. Peningkatan jumlah pekerja laki-laki tahun 2011-2014 tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,72% setiap tahun. Disisi lain, jumlah pekerja perempuan cenderung tidak stabil. Selama tahun 2011-2012, jumlah pekerja perempuan mengalami peningkatan, tetapi selama tahun 2012-2013 jumlah pekerja perempuan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2013-2014, jumlah pekerja perempuan meningkat kembali yaitu dari 42,42 juta orang pada tahun 2013 menjadi 43,16 juta orang pada tahun 2014. Peningkatan pekerja perempuan selama periode 2011-2014 tersebut adalah rata-rata sebesar 2,98% setiap tahunnya.

Tabel 7
Banyak Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Provinsi dalam 10 Tahun Terakhir 1996-2006

No	Provinsi	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Nangroe Aceh Darussalam	61.983	143.446
2	Sumatera Utara	76.857	180.778
3	Sumatera Barat	57.347	115.715
4	Riau	21.768	59.047
5	Jambi	17.248	42.820

6	Sumatera Selatan	52.169	126.445
7	Bengkulu	12.056	26.769
8	Lampung	87.994	199.966
9	Bangka Belitung	6.012	14.977
10	Kepulauan Riau	7.578	16.852
11	Dki Jakarta	34.187	167.656
12	Jawa Barat	451.396	1.131.791
13	Jawa Tengah	830.726	1.892.979
14	Di Yogyakarta	75.950	158.280
15	Jawa Timur	664.938	1.392.447
16	Banten	77.457	173.500
17	Bali	83.052	174.899
18	Nusa Tenggara Barat	124.103	263.728
19	Nusa Tenggara Timur	70.026	121.212
20	Kalimantan Barat	39.740	88.660
21	Kalimantan Tengah	18.188	41.653
22	Kalimantan Selatan	48.164	94.072
23	Kalimantan Timur	14.127	37.769
24	Sulawesi Utara	30.823	65.333
25	Sulawesi Tengah	23.880	49.045
26	Sulawesi Selatan	108.067	220.981
27	Sulawesi Tenggara	39.429	77.437
28	Gorontalo	14.958	28.274
29	Sulawesi Barat	13.562	23.774
30	Maluku	14.802	29.105

31	Maluku Utara	7.575	15.469
32	Irian Jaya Barat	2.498	6.956
33	Papua	5.946	13.521

Sumber: BPS

Seperti sebelumnya provinsi Jawa Tengah begitu sangat dominan terhadap perusahaan dan tenaga yang sangat besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Dimana Jawa Tengah memegang 830.726 perusahaan dan lebih dari 1.892.979 jiwa tenaga kerja.

Kenapa semua kegiatan ekonomi terkonsentrasi di provinsi Jawa Tengah? Dilihat dari perekonomiannya pertanian merupakan sektor utama di Jawa Tengah, dimana mata pencaharian dibidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja yang diserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama dibagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota batik yang dikenal dengan nuansa klasiknya.

Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan UMKM banyak berpusat di Jawa Tengah, ini membuktikan bahwa provinsi Jawa Tengah merupakan sentra dari kegiatan ekonomi di Indonesia.
2. Kebanyakan angkatan kerja mengadu nasib ke Jawa Tengah, karena mereka menganggap Jawa Tengah merupakan provinsi yang strategis untuk bekerja, dan juga banyak nya usaha-usaha kecil yang terdapat diprovinsi tersebut.
3. Dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh UMKM bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau.
4. Sampai saat ini kegiatan ekonomi selalu terpusat di pulau Jawa, ini menandakan adanya kesenjangan ekonomi, sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan di Indonesia.

Saran

1. Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali peran UMKM untuk mengurangi jumlah tingkat pengangguran.
2. Agar selalu tetap mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu yang dihasil dari hasil produksi.
3. Diperlukan pemerataan yang seimbang sehingga kegiatan ekonomi yang bersifat UMKM ataupun informal tidak hanya terpusat di sekitaran pulau Jawa.

4. Agar kegiatan ekonomi jangan hanya berpusat dipulau Jawa saja. Karena akan timbulnya kesenjangan ekonomi terhadap pulau-pulau lain atau provinsi-provinsi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, 1993, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Universitas Indonesia.
- Hasan, Ir. M. Iqbal, M.M, 2009, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, Jakarta.
- Hasan, Iqbal, 2010, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta.
- Jhingan, M.L, 2013, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2007, *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru 2030?* Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2010, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta.
- Mulyadi S, 2012, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta.
- Ridwanaz.com *Ilmu pengetahuan dan Teknologi*
- Sagir, H. Soeharsono, 2009, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta.
- Sumarsono, Sony, 2003, *Upah Minimum bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh*, Jurnal Analisis Sosial vol.7, no.1, hal.77.
- Tambunan, T,H Tulus, 2003, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2012, *Memahami Krisis Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*, Jakarta.
- Todaro, P. Michael, 1998, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta.
- Thomas W. Zhimer, Norman M. Scarborough, dan Doug Wilson, 2008 *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta.
- Winardi, 1998, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Tarsito, Bandung.
- Simanjuntak, Payaman, 2001, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, BPPE UI, Jakarta.
- [http://:bps.go.id](http://bps.go.id)
- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia.